

**DAMPAK AGREGASI KEPENTINGAN POLITIK TERHADAP KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF
PASCA PEMILU 2009
DI KABUPATEN MERAUKE PROPINSI PAPUA**

Oleh : ANTONIUS KUNDUMUYA

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah, (1) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak agregasi kepentingan politik partai, elit politik dan pemodal dalam lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua. (2) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak agregasi kepentingan politik konstituen/masyarakat dalam lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua. (3) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis agregasi kepentingan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengawal kebijakan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kabupaten untuk dijadikan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat di Kabupaten Merauke Propinsi Papua.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif untuk dapat menggambarkan keadaan daerah penelitian dalam mendeskripsikan dan menganalisis agregasi kepentingan politik baik agregasi kepentingan politik partai, elit dan pemodal yang menjadi dampak agregasi kepentingan politik konstituen atau masyarakat di Kabupaten Merauke Propinsi Papua sebagai lokasi penelitian. Penelitian kualitatif dapat disebut sebagai penelitian yang dilaksanakan berdasarkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pengamatan terhadap perilaku setiap orang dalam lokasi penelitian. Penelitian kualitatif dalam pengamatan lain juga merupakan metode berganda dalam fokus yang melibatkan suatu pendekatan, interpretatif, dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya. Penelitian kualitatif bekerja dalam setiap seting alamiah yang berupaya untuk memahami, memberikan tafsiran pada setiap fenomena yang diamati. Penelitian dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Merauke pada bulan Mei 2011. Pengumpulan data penelitian untuk lebih fraktis dan strategi diperoleh beberapa alat ukur disiapkan dalam rangka mendalami permasalahan penelitian. Alat ukur tersebut seperti pengamatan atau survey awal, diskusi, atau studi kepustakaan sebelum penelitian dilakukan. Setelah permasalahan didalami, ujian proposal, pembuatan daftar pertanyaan wawancara dan surat izin penelitian. Apabila semuanya tersedia maka data primer dan data sekunder akan dengan mudah diperoleh. Data primer berhubungan dengan data wawancara dan data sekunder berhubungan dengan data jurnal, laporan kantor/dinas/badan dan buku-buku sebagai pelengkap pendalaman persoalan yang hendak diteliti. Dalam penelitian teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan, adalah: 1) reduksi data (data reduction); 2) paparan data (data display) dan 3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawn/verification).

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu (1) Dampak agregasi kepentingan politik konstituen/masyarakat dalam lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dapat terlaksana dengan tidak baik. Hal ini disebabkan karena dominannya agregasi kepentingan politik elit pemerintah dan politik yang membuat desain politik perencanaan dan politik uang dalam pembahasan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah di lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua (2) Dampak agregasi kepentingan politik partai, elit politik dan pemodal dapat terlaksana dengan baik dalam lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua. Hal ini terjadi karena dominannya politik uang untuk mendapat dukungan partai, elit politik dan pemodal sehingga

loyalitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua lebih loyal terhadap partai politik, elit politik dan pemodal untuk mempertahankan dan menjalankan kekuasaannya pada pemilihan umum berikutnya.

Kata Kunci : *Konsep Agregasi Kepentingan, Konsep Politik, Konsep Kinerja, Konsep Lembaga Legislatif, Konsep Pemilihan*

ABSTRACT

The purpose of this study is, (1) This study aims to describe and analyze the impact of aggregation political parties, political elites and investors in the local people's representative assembly (DPRD) Merauke regency in Papua province. (2) This study aims to describe and analyze the impact of political interest aggregation constituents / communities in the regional representative body (DPRD) Merauke regency in Papua province. (3) This study aims to describe and analyze the aggregation of interests of members of local parliament (DPRD) Merauke regency in Papua Province oversee government policy and community interests of the district to serve as government policies that favor community in Merauke regency in Papua province. The method used in this study is a qualitative method to describe the state of research in the area of describing and analyzing the political interests of both aggregation aggregation political parties, elites and investors has been the impact of political interest aggregation constituents or communities in Merauke regency in Papua province as a test site. Qualitative research can be referred to as the research conducted by descriptive data in the form of words written or spoken of the people and the observation of the behavior of each person in the study location. Qualitative research in other observations are also in the focus of multiple methods involving an approach, interpretive, and fair to each subject matter. Qualitative research work in any natural setting that seeks to understand, provide commentary on each of the observed phenomena. The study was conducted at the Office of the Council of Regency Merauke Perwakilan in May 2011. Research data collection and strategies for more praktis obtained some measure prepared in order to explore research issues. Measuring devices such as observation or initial survey, discussion, or study literature before the study was conducted. Having explored the problem, test the proposal, making a list of interview questions and research permits. If they are available then the primary data and secondary data will be easily obtained. Primary data associated with the interview data and secondary data related to journal data, agency / department / agency and the books as a complement to the deepening of the problem to be investigated. In research analysis techniques used in analyzing qualitative research data there are 3 (three) steps that must be done, is: 1) reduction of data (data reduction), 2) exposure of data (data display) and 3) drawing conclusions and verification (conclusion drawn / verification). Conclusions of the research and discussion that is (1) The impact of political interest aggregation constituents / communities in the regional representative body (DPRD) Merauke regency in Papua province can be accomplished with either. This is because the dominant political interest aggregation government and political elites who make policy design planning and money politics in the discussion and determination of regional development policies in local people's representative institutions (parliament) Merauke regency in Papua Province (2) Impact of aggregation political parties, political elites and financiers can be done well in local people's representative body (DPRD) Merauke regency in Papua province. This happens because of the dominance of money to support political parties, political elites and financiers that loyalty member Legislative Council (DPRD) Merauke regency in Papua province more loyal to political parties, political elites and financiers to maintain and run the power at the next general election.

Key words: *Concept Aggregation of Interests, Political Concepts, Performance Concepts, Legislative Concept, Concept Selection*

PENDAHULUAN

Agregasi kepentingan politik sesungguhnya berhubungan dengan menyampaikan pendapat oleh karena itu, menyampaikan pendapat di depan umum dan mempertimbangkannya secara seksama merupakan prinsip utama kebebasan berpendapat dan berekspresi di depan publik. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-empat Pasal 28F mempertegas bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28F ini secara esensial mengamanatkan hakikat kemerdekaan bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengemukakan pendapat dan mendapatkan informasi. Amanah ini ditujukan pada: 1) penegakan hak-hak asasi bagi seluruh warga negara Indonesia, 2) penegakan demokrasi dalam tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, dan 3) penegakan kesadaran kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Ketiga sasaran yang hendak dicapai dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat yang isinya: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan 3) ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Atas dasar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sistem kepartaian dan Pemilu di Indonesia sejak masa reformasi telah dirubah seperti sistem kepartaian satu partai tunggal dan dua Golongan Karya di masa pemerintahan orde baru. Dalam masa reformasi digantikan secara sistem multi partai dan sistem Pemilu dengan model distrik digantikan dengan model proporsional sedikit terbuka, sejak memasuki Pemilu 1999. Inilah model proporsional tertutup dalam pemilihan umum yang terjadi dalam Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 di Indonesia baik dalam pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah atau kepala pemerintahan negara (presiden dan wakil presiden).

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa semenjak pemilihan umum 3 (tiga) kali di era reformasi, partai politik dengan sistem proporsional sedikit terbuka mempunyai peluang dan kesempatan yang terbuka, kuat dan sistematis untuk mengagregasikan kepentingannya terhadap setiap kandidat yang diusung oleh partai politik untuk mewakili rakyat duduk di lembaga perwakilan rakyat (DPR) baik di pusat, propinsi, kabupaten/kota lebih khusus di kabupaten Merauke Propinsi Papua. Agregasi kepentingan politik, partai politik yang dimaksud di sini adalah politik dinasti (apabila orang tua ketua partai/kepala daerah ibunya/anaknya dan sanak saudaranya mempunyai peluang yang besar menjadi kandidat dan lebih cenderung duduk di lembaga perwakilan rakyat baik pusat, propinsi, kabupaten/kota lebih khusus di kabupaten Merauke. Ini merupakan permasalahan pertama. Permasalahan kedua adalah politik uang dan romatisme politik. Maksudnya walaupun seseorang yang tidak mempunyai pengalaman di partai dan tidak pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat, propinsi, kabupaten/kota asalkan ada uang untuk dibayarkan kepada partai politik pengusungnya bisa dilakukan dan mengenai romatisme politik ditujukan kepada seseorang yang mempunyai kapasitas terkenal di masyarakat. Walaupun tidak berpendidikan tinggi atau dari kalangan preman bisa dicalonkan seperti kepala bagian. Preman bisa menjadi anggota DPRD atau propinsi/kota bahkan menjadi bupati/walikota. Contoh lain artis yang hanya tugasnya atau kerjanya menyanyi atau main film dengan mudah menjadi anggota dewan atau kepala/wakil kepala daerah.

Inilah dampak atau kelemahan sistem atau model proporsional sedikit terbuka yang terjadi di Kabupaten Merauke bahkan hampir merata di seluruh daerah di Indonesia.

Dari latar belakang dan penentuan pokok-pokok masalah yang diungkapkan di atas, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana dampak agregasi kepentingan politik konstituen/masyarakat dalam lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua pasca Pemilu 2009”.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak agregasi kepentingan politik partai, elit politik dan pemodal dalam lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif untuk dapat menggambarkan keadaan daerah penelitian dalam mendeskripsikan dan menganalisis agregasi kepentingan politik baik agregasi kepentingan politik partai, elit dan pemodal yang menjadi dampak agregasi kepentingan politik konstituen atau masyarakat di Kabupaten Merauke Propinsi Papua sebagai lokasi penelitian. Secara teori metode penelitian kualitatif ini cenderung disebut juga penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat disebut sebagai penelitian yang dilaksanakan berdasarkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pengamatan terhadap perilaku setiap orang dalam lokasi penelitian.

Penelitian kualitatif dalam pengamatan lain juga merupakan metode berganda dalam fokus yang melibatkan suatu pendekatan, interpretatif, dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya. Penelitian kualitatif bekerja dalam setiap setting alamiah yang berupaya untuk memahami, memberikan tafsiran pada setiap fenomena yang diamati.

Dengan demikian dalam penelitian ini terlihat bahwa penelitian kualitatif merupakan metode atau pendekatan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak agregasi kepentingan politik terhadap kinerja lembaga legislatif pasca Pemilu 2009 di Kabupaten Merauke Propinsi Papua.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari penjelasan yang diungkapkan dalam penelitian ini dari berbagai hasil penyebaran kuesioner dengan disertai wawancara yang lebih mendalam. Hasil tabulasi data keseluruhan dalam penelitian ini dapat dijelaskan di bawah ini :

Tabel 1.

Jawaban tentang dampak Agregasi kepentingan politik partai, elit politik dan pemodal dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua

Jawaban Informan (Pertanyaan)	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sangat baik	17	34
Baik	30	60
Cukup baik	3	6
Tidak baik	-	-
Jumlah	50	100

Tabel 2.

Jawaban informan tentang dampak agregasi kepentingan politik, konstituen/masyarakat dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua

Jawaban Informan (Pertanyaan)	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sangat baik	-	-
Baik	5	10
Cukup baik	13	26
Tidak baik	32	64
Jumlah	50	100

Tabel 3.

Jawaban informan tentang dampak agregasi kepentingan politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengawal kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat/konstituen di Kabupaten Merauke Propinsi Papua

Jawaban Informan (Pertanyaan)	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sangat baik	25	50
Baik	20	40
Cukup baik	3	6
Tidak baik	2	4
Jumlah	50	100

Tabel 4.

Jawaban informan tentang partisipasi politik masyarakat/konstituen dalam mendukung agregasi kepentingan politiknya di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua

Jawaban Informan (Pertanyaan)	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sangat baik	5	10
Baik	13	26
Cukup baik	27	54
Tidak baik	5	10
Jumlah	50	100

Tabel 5

Jawaban informan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua memperjuangkan agregasi kepentingan politik konstituen/masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah Kabupaten Merauke Propinsi Papua

Jawaban Informan (Pertanyaan)	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sangat baik	-	-
Baik	1	2
Cukup baik	7	14
Tidak baik	42	84
Jumlah	50	100

Tabel 6

Jawaban informan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengagregasikan kepentingan konstituen/masyarakat pada sidang-sidang komisi, sidang-sidang fraksi, sidang penetapan anggaran tahunan di Kabupaten Merauke Propinsi Papua

Jawaban Informan (Pertanyaan)	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sangat baik	3	6
Baik	5	10
Cukup baik	3	6
Tidak baik	39	78
Jumlah	50	100

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dikatakan bahwa dari 50 kuesioner yang diedarkan, 17 orang informan atau 34% informan menyatakan bahwa dampak agregasi kepentingan politik, partai, elit politik (pemerintah) dan pemodal dalam (lembaga) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke terlaksana dengan sangat baik. Sementara 30 orang informan atau 60% informan menyatakan bahwa dampak agregasi kepentingan politik partai elit politik (pemerintah dan pemodal dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke terlaksana dengan baik dan sisa 3 orang informan atau 6% orang informan menyatakan bahwa dampak agregasi kepentingan politik partai elit politik (pemerintah) dan pemodal dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Merauke dapat terlaksana dengan cukup baik. Selanjutnya dapat dikatakan lebih mendalam bahwa 43% informan yang menyatakan bahwa dampak agregasi kepentingan politik partai politik (pemerintah) dan pemodal dapat terlaksana dengan sangat baik lembaga dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke. Kemudian 60% informan yang menyatakan bahwa dampak agregasi kepentingan politik partai, elit politik (pemerintah) dan pemodal dapat terlaksana dengan baik dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke. Sisanya 6% informan yang menyatakan dampak agregasi kepentingan politik partai, elit politik (pemerintah) dan pemodal dapat terlaksana dengan cukup baik dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua. Jadi sesungguhnya, agregasi kepentingan politik, partai politik, elit politik (pemerintah) dan pemodal tidak terlaksana maksimal dan tersendat-sendat. Dengan alasan ini pun informan menyatakan bahwa dampak agregasi kepentingan politik partai, elit politik (pemerintah) dan pemodal terlaksana dengan cukup baik dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua.

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa dari 50 kuesioner yang diedarkan, 10 orang informan atau 20% informan menyatakan bahwa sangat agregasi kepentingan politik konstituen atau publik dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Merauke terlaksana dengan baik. Sementara 13 orang informan atau 26% informan menyatakan bahwa dampak agregasi kepentingan politik konstituen/publik terlaksana dengan baik dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke. Selanjutnya diketahui lebih mendalam bahwa 10% informan yang menyatakan bahwa dampak agregasi kepentingan politik konstituen/publik dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke dapat terlaksana dengan baik. Kemudian 26% informan menyatakan bahwa dampak agregasi kepentingan

konstituen/publik dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke dapat terlaksana dengan baik. Sisanya 64% informan menyatakan bahwa dampak agregasi kepentingan konstituen/publik dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke terlaksana dengan tidak baik. Ini menunjukkan bahwa lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke dalam mengakomodir kepentingan konstituen apabila diperintahkan oleh elit politik pemerintah yang berkuasa untuk mengamankan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berhubungan dan pengamanan proyek/bisnis pertambangan yang menguntungkan demi menjalankan kelunasan dalam pemerintahan dan politik di masa pemilihan berikutnya. Dengan demikian para informan menyatakan bahwa dampak agregasi kepentingan politik konstituen/publik dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke terlaksana dengan tidak baik.

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa 50 kuesioner yang diedarkan, 25 orang informan atau 50% informan menyatakan bahwa dampak agregasi kepentingan politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengawal kebijakan pemerintah dan kepentingan konstituen atau masyarakat di Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan sangat baik. Selanjutnya 20 orang informan atau 40% informan menyatakan bahwa dampak agregasi kepentingan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengawal kebijakan pemerintah dan kebijakan kepentingan konstituen/masyarakat di Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan baik. Sementara 3 orang informan atau 60% informan menyatakan bahwa dampak agregasi kepentingan politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengawal kebijakan pemerintah dan kepentingan konstituen/masyarakat di Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan cukup baik dan sisanya 2 orang informan atau 4% informan menyatakan bahwa dampak agregasi kepentingan politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengawal kebijakan pemerintah dan kepentingan konstituen/masyarakat di Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan tidak baik. Selanjutnya diketahui lebih mendalam bahwa 50% informan yang menyatakan bahwa dampak agregasi kepentingan politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengawal kebijakan pemerintah dan kepentingan konstituen/masyarakat di Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan sangat baik. Kemudian 40% informan menyatakan bahwa agregasi kepentingan politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengawal kebijakan pemerintah dan kepentingan konstituen/masyarakat di Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan baik. Selanjutnya 60% informan menyatakan bahwa agregasi kepentingan politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengawal kebijakan pemerintah dan kepentingan konstituen/masyarakat di Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan cukup baik. Dan sebanyak 4% informan menyatakan bahwa agregasi kepentingan politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengawal kebijakan pemerintah dan kepentingan konstituen/masyarakat di Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan tidak baik.

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa 50 kuesioner yang diedarkan, 10 orang informan atau 10% orang informan menyatakan bahwa partisipasi politik masyarakat/konstituen dalam mendukung agregasi kepentingan politiknya di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan sangat baik. Sementara 13 orang informan atau 26% orang informan menyatakan bahwa partisipasi politik masyarakat/konstituen

dalam mendukung agregasi kepentingan politiknya di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan baik. Selanjutnya 27 orang informan atau 54% orang informan bahwa partisipasi politik, masyarakat/konstituen dalam mendukung agregasi kepentingan politiknya di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan cukup baik dan sisanya 5 orang informan atau 10% informan menyatakan bahwa partisipasi politik masyarakat/konstituen dalam mendukung agregasi kepentingan politiknya di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan tidak baik. Selanjutnya dapat diketahui lebih mendalam bahwa 10% orang informan yang menyatakan bahwa partisipasi politik masyarakat/konstituen dalam mendukung agregasi kepentingan politiknya di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana sangat baik. Kemudian 26% orang informan menyatakan bahwa partisipasi politik masyarakat/konstituen dalam mendukung agregasi kepentingan politiknya di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan baik. Sementara itu 84% orang informan menyatakan bahwa partisipasi politik masyarakat/konstituen dalam mendukung agregasi kepentingan politik di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan cukup baik. Dengan demikian partisipasi politik masyarakat/konstituen dalam mendukung agregasi kepentingan politik di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan cukup baik dan sisanya 10% orang informan menyatakan bahwa partisipasi politik masyarakat/konstituen dalam mendukung agregasi kepentingan politiknya di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan baik. Sehingga berbagai aspirasinya sepenuhnya tidak banyak diakomodir di dalam pembuatan-pembuatan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Merauke Propinsi Papua. Partisipasi politik murni masyarakat hanya terlihat pada pemilihan umum. Selain itu partisipasi masyarakat/konstituen di Kabupaten Merauke terlaksana melalui/dilakukan melalui sistem perwakilan yang tertutup pada tokoh masyarakat, adat, agama dan pemerintah desa. Dengan demikian partisipasi masyarakat/konstituen dalam mendukung agregasi kepentingan politiknya di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana secara tidak baik.

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa 50% kuesioner yang diedarkan, 1 orang informan atau (2%) orang informan menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua memperjuangkan agregasi kepentingan politik konstituen/masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan oleh Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Pemerintah Kabupaten Merauke Propinsi Papua dengan baik. Kemudian 7 orang informan atau 14% orang informan menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua memperjuangkan agregasi kepentingan politik konstituen/masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan cukup baik dan sisanya 42 orang informan atau 84% orang informan menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua memperjuangkan agregasi kepentingan politik konstituen/masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan tidak baik. Selanjutnya dapat diketahui lebih mendalam bahwa 2% orang informan menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua memperjuangkan agregasi kepentingan politik konstituen/masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Merauke

terlaksana dengan baik. Kemudian 14% orang informan menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua memperjuangkan agregasi kepentingan politik dalam proses pembuatan kebijakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Merauke dapat terlaksana dengan cukup baik. Sisanya 84% orang informan menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua memperjuangkan agregasi kepentingan politik konstituen/masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan tidak baik. Dalam kondisi ini politik kepentingan bupati dan wakil bupati serta tim suksesnya mendominasi. Kelompok oposisi dan kelompok poros tengah memainkan berbagai manuver politiknya. Kepentingan konstituen/masyarakat otomatis terabaikan dalam pertarungan politik ini. Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua memperjuangkan agregasi kepentingan politik konstituen/masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Merauke dinilai terlaksana dengan tidak baik.

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa 50% kuesioner yang diedarkan, 3 orang informan atau 6% orang informan menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengagregasikan kepentingan politik konstituen/masyarakat pada sidang-sidang komisi, sidang-sidang fraksi dan sidang-sidang penetapan anggaran tahunan di Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan sangat baik. Sementara 5 orang informan atau 10% orang informan menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengagregasikan kepentingan politik konstituen/masyarakat pada sidang-sidang komisi, sidang-sidang fraksi dan sidang-sidang penetapan anggaran tahunan di Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan baik. Kemudian 3 orang informan atau 6% orang informan menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengagregasikan kepentingan politik konstituen/masyarakat pada sidang-sidang komisi, sidang-sidang fraksi dan sidang-sidang penetapan anggaran tahunan di Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan cukup baik dan sisanya 39 orang informan atau 78% orang informan menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengagregasikan kepentingan politik konstituen/masyarakat pada sidang-sidang komisi, sidang-sidang fraksi dan sidang-sidang penetapan anggaran tahunan di Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan tidak baik. Selanjutnya dapat diketahui lebih mendalam bahwa 6% orang informan menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengagregasikan kepentingan politik konstituen/masyarakat pada sidang-sidang komisi, sidang-sidang fraksi dan sidang-sidang penetapan anggaran tahunan di Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan baik. Dalam kondisi ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke hanya bisa bekerja secara maksimal dalam mengagregasikan kepentingan politik konstituen/masyarakat sesuai dengan agenda otonomi khusus di Propinsi Papua lebih khusus di Kabupaten Merauke. Selain anggaran otonomi khusus, anggaran PNPM-Mandiri dan anggaran sosial lain yang beredar setiap tahun Rp 100 juta - Rp 300 juta per kampung di Kabupaten Merauke Propinsi Papua. Kemudian 10% orang informan menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengagregasikan kepentingan politik konstituen/masyarakat pada sidang-sidang komisi, sidang-sidang fraksi dan sidang-sidang penetapan anggaran belanja tahunan di Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan baik. Mereka ini adalah kelompok kepentingan yang menggunakan otonomi khusus atau bantuan Rp 100 juta per kampung dan bantuan sosial dari

Anggaran Belanja Daerah (APBD) untuk politik pencitraan bahwa mereka layak untuk terus berkuasa dan terus mendapat legitimasi politik dari konstituen/masyarakat. Selain itu 6% orang informan menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengagregasikan kepentingan politik konstituen/masyarakat dalam sidang-sidang komisi, sidang-sidang fraksi dan sidang penetapan belanja tahunan Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan cukup baik. Sisanya 78% orang informan menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengagregasikan kepentingan konstituen/masyarakat pada sidang-sidang komisi, sidang-sidang fraksi dan sidang penetapan anggaran belanja tahunan Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan tidak baik. Penindasan, intimidasi, teror bahkan penculikan dan pembunuhan menghantui masyarakat yang hendak memperjuangkan agregasi kepentingan politiknya untuk dijadikan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Merauke Propinsi Papua. Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dalam mengagregasikan kepentingan konstituen/masyarakat pada sidang-sidang komisi, sidang-sidang fraksi dan sidang penetapan anggaran belanja tahunan Kabupaten Merauke Propinsi Papua terlaksana dengan tidak baik.

KESIMPULAN

Dampak agregasi kepentingan politik konstituen/masyarakat dalam lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua dapat terlaksana dengan tidak baik. Hal ini disebabkan karena dominannya agregasi kepentingan politik elit pemerintah dan politik yang membuat desain politik perencanaan dan politik uang dalam pembahasan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah di lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua.

Dalam penelitian ini, diharapkan keikutsertaan konstituen secara terbuka dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah melalui sistem musyawarah dan diatur secara konstitusional guna menjadi alat kontrol lembaga legislatif dan lembaga eksekutif mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan di Kabupaten Merauke Propinsi Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, 2005. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta. Pusat studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Budi Winarno, 2008. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta. MedPress.
- Kuskridho Ambardi, 2009. *Mengungkap Politik Kartel, Suatu Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Gramedia.
- Mantja, 2007. *Profesionalisme Tenaga Pendidikan*. Manajemen Supervisi Pengajaran. Malang: Elang Emas.
- Paiman Napitupulu. 2005. *Peran dan Pertanggungjawaban DPRD*. Kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta. Jakarta: Bandung AWWMI.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-Empat.
- Agus Pramono,(2005). *Elit Politik: Yang loyo dan harapan masa depan*. Pustaka Sinar Harapan,Jakarta.
- Quicham,(2010). Dampak Dinamika Politik, *Jurnal Litbang International Student Ha Anim In Distryck Merauke*.
- Jurnal Pemuda Berdaulat (2010:12). Tentang Masikah Kedaulatan Negara Milik Rakyat Indonesia.

- Miriam Budiarjo.(2008:17). *Dasar-dasar ilmu politik*. Cetakan Pertama Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Harbani Pasolong. (2008:196). *Kepemimpinan Birokrasi*. Cetakan Kesatu. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Akbar Kaelola. (2009:11). *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Cetakan Pertama. Penerbit Cakrawala.
- Efriza. (2008:13). *Ilmu Politik. Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*. Penerbit Afabeta Bandung.